

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Seluruh responden (50 responden/100%) yang telah mendaftarkan Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2010 telah mendapatkan sertipikat Hak Milik atas tanah. Dari seluruh responden tidak ada responden yang belum menerima sertipikat Hak Milik atas tanah sehingga wujud kepastian hukum telah terlaksana. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena seluruh responden (100%) telah menerima sertipikat Hak Milik atas tanah. Pada pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA tahun 2010 di Kabupaten Bantul sebanyak 3.450 bidang tanah telah terdaftar dan diterbitkan sertipikat.

B. Saran-saran

1. Pemerintah

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diharapkan lebih aktif dalam melakukan penyuluhan tentang pentingnya Pendaftaran Tanah dan kepemilikan sertipikat tanah sebagai alat bukti yang kuat, prosedur dan syarat-syarat Pendaftaran Tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul juga diharapkan lebih sering mengadakan program-program pensertipikatan tanah sebab dengan adanya program

sertifikasi tanah dari Pemerintah dapat membantu dan meringankan masyarakat mensertifikatkan Hak Milik atas tanah mereka.

b. Pemerintah Desa Tirenggo dan Tamantirto diharapkan tidak membebankan biaya pelaksanaan PRONA kepada masyarakat karena Pendaftaran Tanah melalui PRONA merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya dibebankan pada Anggaran Belanja Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri dan Yayasan Dana Landreform.

2. Pemilik tanah di Kabupaten Bantul diharapkan semakin memahami pentingnya Pendaftaran Tanah dan kepemilikan sertifikat tanah sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi 1, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali Achmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Cetakan I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Cetakan I, Margaretha Pustaka, Jakarta Selatan
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Djaka Soehendera, 2010, *Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa Jakarta*, Edisi 1, HuMa; Van Vollenhoven Institute; KITLV, Jakarta
- Eddy Ruchiyat, 1992, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Cetakan III, Penerbit Alumni, Bandung
- Effendi Perangin-angin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta
- Herman Hermit, 2004, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda; Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung
- Imam Koeswahyono, dkk., 2007, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung
- Kartini Muljadi, dkk., 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi 1, Cetakan III, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES
- Mochammad Tauchid, 2007, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Dua Warna, Yogyakarta

Mukti Fajar Nur Dewata, dkk., 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Edisi 1, Cetakan I, Graha Ilmu, Yogyakarta

Soedharyo Soimin, 2008, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Edisi 2, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Edisi 1, Cetakan I, Jakarta

Urip Santoso, 2008, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

-----, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Edisi I, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cetakan I, Total Media, Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Setelah Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999

Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 Tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah yang Berasal dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria

Website

<http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Legalisasi-Aset/Program-Program/Sertifikasi-PRONA>, Badan Pertanahan Nasional, *Sertifikasi PRONA*, 4 Maret 2014

<http://lama-bappeda.bantulkab.go.id/documents/20140311152808-bab-4rpjmd-kabupaten-bantul-2011-2015.pdf>, *Wakil Bupati Bantul Drs. Sumarno, Prs. Serahkan 322 Sertifikat Tanah*, 10 Agustus 2014

Skripsi

Giovani Agnelli Susanti, 2014, Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C) Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Gunungkidul, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Eko Purwanto, 2014, Pelaksanaan PRONA (Hak Milik) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Gunungkidul, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.